

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA RAMBAH TENGAH HULU
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2009-2013**

Oleh :

Mahendra

Email: 22marli42@gmail.com

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin M.si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Program studi Ilmu pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widyia Jl. H. R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.
Telp/fax. 0761-63277

Abstract

The problem in this research is how the implementation of the development in the Village Middle Rambah Rambah Hulu District of Rokan Hulu in the year 2009-2013 and the factors inhibiting the implementation of the development in the Village Middle Rambah Rambah Hulu District of Rokan Hulu. Implementation of village development Rambah Central Hulu, the authors noticed there is still potential to be managed premises well, so it will give more support rural incomes and for equitable development can be achieved, which is still the wealth of the village in the form of land which can be used and managed by the village government and with the community ,

The purpose of this is to determine the factors that affect the implementation of development in the village of Central Rambah Rambah Hulu District of Rokan Hulu. With the research methods used in this study is a qualitative research data collection techniques used is by using the technique of observation, interview and documentation.

The results of this study, that the Government Rural Middle Rambah Hulu in conducting village development is influenced by several factors, namely; factor of personnel resources of the village, the source of funding factors, factors of community participation and community motivation factor. Village Middle Rambah Hulu is still not able to optimize the three elements of development, namely; government, public and private, and the authors suggest to the Government of Hulu's Village Central Rambah that would improve the ability of village officials and good communication in carrying oriented government on regional autonomy.

Keywords: *Human Resources, Funding, Community Participation and Motivation.*

A. Pendahuluan

Reformasi membawa perubahan dalam sistem Pemerintahan di Indonesia, pada era orde lama terjadi sentralisasi pemerintahan dan pasca reformasi terjadi desentralisasi pemerintahan dan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan luas serta tanggung jawab kepada daerah yang diwujudkan dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan pusat dan daerah.

Tujuan Pembangunan dapat di capai melalui perencanaan yang direncanakan dengan baik dan terlaksana bertahap dalam pelaksanaannya dan terarah dan yang utama adalah pembangunan organisasi yang merupakan suatu faktor yang menunjang kelancaran setiap aspek pembangunan yang akan di bangun. Pembangunan Organisasi merupakan pergerakan dari sumber-sumber terutama penyusunan orang-orang sehingga dapat melaksanakan tugasnya yang efektif, efisien dan pola ini di sebut sebuah struktur organisasi.

Tujuan pembangunan seperti yang telah diketahui adalah untuk meningkatkan pola kehidupan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dapat dilaksanakan bersinergi dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan pembangunan serta menjalankan peraturan.

Desa Rambah Hulu salah satu Desa di Kecamatan Rambah di Kabupaten Rokan Hulu, yang sedang melakukan pembangunan dan menjalankan tatanan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuat perencanaan sesuai dengan aspirasi kepentingan masyarakat dalam rangka menunjang usaha masyarakat,

dalam rangka meningkatkan tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Desa Rambah Tengah Hulu adalah bagian Desa dari Kecamatan Rambah yang dimana Kecamatan Rambah memiliki 13 Desa. Desa Rambah Tengah Hulu merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Rambah di Kabupaten Rokan Hulu yang mayoritas masyarakat etnis mandailing, yang sedang berkembang diharapkan dapat mencapai hasil pembangunan di masa yang akan datang dengan usaha yang optimal untuk tercapainya Visi dan Misi desa.

Dalam perumusan perencanaan pembangunan pada suatu Daerah/Desa ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan meliputi:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. BPD
4. LKMD/LPMD
5. Masyarakat Desa

Dalam melakukan perumusan perencanaan ada empat tahap yang perlu dilakukan yakni :

1. Menetapkan tujuan.
2. Merumuskan keadaan sekarang.
3. Mengidentifikasi kemudahan.
4. Mengembangkan serangkaian kegiatan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa perencanaan merupakan proses yang memerlukan pihak-pihak yang berkepentingan baik terlibat dalam proses perencanaan mulai dari masyarakat sampai aparatur Pemerintahan Desa, pada proses perencanaan pembangunan, pada saat implementasi perencanaan serta saat proses setelah pembangunan berjalan diawasi oleh masyarakat serta aparatur Pemerintahan Desa. Salah satu aspek penting dalam perencanaan adalah pembuatan keputusan, sehingga menjadi keputusan yang prioritas, yang dapat memecahkan masalah serta dapat

menyerap aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu masih jauh tertinggal di banding desa-desa yang ada di Kecamatan Rambah. Perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparaturnya Pemerintahan Desa belum bisa menjawab aspirasi masyarakat serta tidak bersinergi dengan Visi dan Misi Desa.

Selain itu laporan rancangan pembangunan yang terlaksana dari Pemerintah Desa Rambah Tengah Hulu ini atas dana yang di ambil dari APB-Des Desa Rambah Tengah Hulu ini masih sangat minim yang di mana dari 2009 sampai 2013 hanya pada tahun 2009 sampai tahun 2010, sedangkan tahun 2011 sampai tahun 2013 tidak ada pembangunan melalui alokasi dana desa.

Pembangunan yang di lakukan atas partisipasi Pemerintah Desa belum terlaksana secara optimal dimana hanya pada tahun 2009 rancangan pembangunan yang dilakukan melalui dana APB-Desa sedangkan dari tahun 2010 sampai 2013 tidak ada rancangan yang dilakukan desa melalui dana APB-Des, yang di mana anggaran yang ada di desa ini banyak di pakai tuk biaya operasional Desa.

Peneliti tertarik meneliti di Desa ini dari tahun 2009-2013 disebabkan untuk melihat kepemimpinan kepala Desa baru didalam proses pembangunan di Desa.

Desa Rambah Tengah Hulu masih belum maksimal anggaran yang di dapat baik dari Pemerintah Daerah maupun dari PAD Desa ini sendiri. Di mana dari 5 tahun terakhir nilai APB-Des Desa ini tidak mencapai angka di kisaran 300.000.000 juta rupiah, dan pada tahun 2014 APB-Des Desa Rambah Tengah Hulu ini mengalami peningkatan di angka kisaran 347.060.000 juta rupiah yang di mana tahun ini adalah tahun politik.

Desa Rambah Tengah Hulu ini juga tidak memperoleh atau memiliki

semen penghasil yang di hasil kerja sama dengan investor atau APB-Des yang di peroleh dari hasil kerja sama.

1. Perencanaan yang tidak sesuai dengan Visi dan Misi.

Visi: Terwujudnya Masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu yang aman, damai, adil makmur, sentosa dan sejahtera dengan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang di dukung oleh masyarakat yang sehat, mandiri dan berilmu pengetahuan yang cukup berdisiplin serta mempunyai kesadaran gotong royong yang tinggi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Misi :

- a. Perwujudan peningkatan Kinerja Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat melayani masyarakat yang profesional, transparansi, berdaya guna dan produktif.
- b. Meningkatkan taraf kehidupan warga masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu dalam perwujudan yang layak, meningkatkan kualitas kehidupan sandang dan pangan.
- c. Penjaminan kondisi Desa dalam keadaan aman, damai, tertib dan Kondusif.
- d. Melaksanakan pengamalan Pancasila secara konsisten dalam masyarakat serta berbangsa dan Bernegara.

Desa Rambah Tengah Hulu adalah termasuk Desa Swadaya. Adapun ciri ciri Desa Swadaya Menurut Drs. Bayu Surianingrat (1985: 163) adalah :

1. Kepadatan penduduk rendah, artinya bahwa penduduk Desa dibandingkan dengan luas Desa, adalah jarang.
2. Hubungan dengan Kota misalnya Ibu Kota Provinsi, Kabupaten jauh.
3. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.

4. Bersifat tertutup.
5. Masyarakat memegang teguh adat.
6. Sarana dan Prasarana sangat kurang.
7. Teknologi yang masih rendah.
8. Hubungan antar manusia sangat erat.
9. Tingkat pendidikan masih rendah.
10. Tingkat produksi Desa rendah (Rp 50 juta kebawah)

Dari beberapa masalah diatas, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu belum terlaksana dengan baik terbukti dengan rendahnya tingkat pembangunan.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana proses pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu. Peneliti memilih Desa Rambah Tengah Hulu karena ada permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan diatas. Dari permasalahan-permasalahan diatas yang terjadi, Desa Rambah Tengah Hulu belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi serta koordinasi yang baik kepada pemerintah daerah untuk dapat pembagian anggaran untuk pembangunan.

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu terhadap rendahnya realisasi pembangunan yaitu :

1. Masyarakat merasa pemerintah desa kurang membuat suatu gagasan yang memiliki kemanfaatan pembangunan yang langsung menyentuh ke perekonomian masyarakat.
2. Pemerintah desa sangat sulit memperjuangkan rancangan yang telah dibuat di tingkat Kabupaten untuk terrealisasi.
3. Pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu melalui dana Alokasi Dana Desa dari tahun 2009 samapai tahun 2013 pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah desa hanya tahun 2009

dan 2010 sementara pada tahun 2011 sampai 2013 tidak ada pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu melalui dana Alokasi Dana Desa.

4. Pemerintah desa perlunya pengoptimalisasi anggaran yang telah ada.

Di lihat dari fenomena diatas masyarakat belum merasakan optimalisasi Permasalahan diatas yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang rendahnya tingkat pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu di Kabupaten Rokan Hulu. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul ***“PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA RAMBAH TENGAH HULU KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2009-2013.”***

B. Tinjawan Pustaka

1. Pembangunan

Pembangunan nasional merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan amanat dan cita-cita bangsa, begitu juga dengan pembangunan desa. Pemerintah selaku aparat yang bertugas melayani kepentingan masyarakat memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan program pembangunan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Taliziduhu Ndraha (2005:48) menyatakan bahwa hakekatnya keberhasilan pembangunan desa ditentukan oleh empat hal yang penting, yaitu :

1. Adanya keikutsertaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha meningkatkan taraf hidup mereka.
2. Sumber-sumber pendapatan desa.

3. Fungsi lembaga desa dan keterlibatan perangkat desa.

Menurut penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilakukan di desa dengan melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, serta disusun berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa dapat dikatakan berhasil apa bila seluruh usaha-usaha yang dilakukan di dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk mendapatkan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana.

Selain itu **Taliziduhu Ndraha (1991:1)** mendefinisikan bahwa pembangunan desa adalah merupakan suatu proses dengan mana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup orang masyarakat mengintegrasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bahwa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan Nasional.

Sedangkan menurut **Riant Nugroho (2006:10)** pembangunan secara sederhana dapat di artikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami, baik dari segi definisi ekonomi, sosial politik, atau hukum.

Lebih jauh **Riant Nugroho (2006:10)** mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sasaran yang ingin di capai dalam penyelenggaraan pembangunan antara lain :

1. Terciptanya kordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara sektor ruang dan waktu serta sesuai kepentingan masyarakat.
2. Menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang disepakati

3. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan dan keterlibatan penyelenggaraan dan masyarakat.
4. Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan secara efisiensi dan efektif.

Oleh karena itu pembangunan diartikan suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan pada norma norma tertentu, perencanaan pembangunan potensi alam, manusia dan sosial budaya. (**Haryono Sudriamunawar, 2002:15**)

Pembangunan di artikan sebagai suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa Negara dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lahiriah dan batiniah. (**Yaya M dan Ade Priangani, 2002:101**). Secara singkat dari pengertian tersebut bahwa pandangan atau pola pikir ilmu terhadap pembangunan pada dasarnya merupakan tranpormasi sosial masyarakat yang bermuara kepada ekonomi.

Menurut **Kencana Syafei (2003:9)** mengemukakan bahwa: sistem pemerintahan, politik dan administrasi Negara Republik Indonesia ini haru merupakan penjabaran nilai nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam eksistensinya sistem pemerintahan, politik dan administrasi negara ini akan berkembang secara terus menerus sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan dan perkembangan yang ada di dalam faktor lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Sumbang Daya Aparatur Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan erat kaitannya dengan hasil dari perencanaan tersebut. Menurut Dedy Supriady Bratakusumah dalam Rahardjo Adisasmita (2006:24) pada setiap aktifitas/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok, sumber daya manusia selalu menjadi faktor utama sebagai “motor” penggerak. Dan lemahnya perencanaan pembangunan sangat erat kaitannya dengan pendidikan.

2. Faktor Sumbang Dana

Menurut Rahardjo Adisasmita (2006:87) dana yang tersedia sangat terbatas dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan masyarakat, sehingga alokasi dana untuk membiayai berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat belum dapat tercapai secara optimal.

3. Faktor Partisipasi Masyarakat

Kramer (Ndraha, 1991) mengatakan bahwa partisipasi akan mengandung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan. Partisipasi mengarah pada pengembangan program penduduk yang di tempatkan sebagai konsumen utama dari program-program pembangunan infrastruktur fisik daerah. Partisipasi diadakan dalam rangka nilai keadilan sosial, dan dalam rangka tersedianya kelengkapan memperoleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Faktor Motivasi Masyarakat

Menurut Mulyasa (2003:112) motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Dengan contoh seorang siswa akan belajar sungguh-sungguh kearah suatu tujuan tertentu karna ada faktor pendorong yang disebut motivasi.

2. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintahan Desa

adalah Pemerintah Desa dan Badan Pemerintahan Desa.

Menurut pasal 12 didalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa di katakan:

1. Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
3. Perangkat Desa lainnya sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
 - a. Sekretariat desa;
 - b. Pelaksanaan teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.
4. Jumlah Perangkat Desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
5. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bayu Suryaningrat (2002:2) berpendapat bahwa pemerintahan adalah Perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintahan yang adil dan pemerintahan yang demokrasi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.

Menurut **Taliziduhu Ndraha (2003:6)** Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tuntunan yang di perintah.

Menurut Sehumaker dalam **Ryass Rasyid (1982:46-47)** mengatakan bahwa

dalam pembangunan terdapat masalah pembangunan yakni tingkat pendidikan, organisasi dan tingkat disiplin yang masih rendah sehingga mengalami kendala di dalam pembangunan ekonomi.

Dilihat dari pengertiannya, makna Ilmu Pemerintahan menurut **Inu Kencana Syafai (2002:1)** ialah ilmu yang mempelajari bagai mana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan kordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut **Budi Suryaningrat (2002:2)** fungsi fungsi pemerintahan regional dapat di golongkan di dalam lima pengelompokan, yakni :

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan.
2. Fungsi pengaturan yakni perumusan dan penegakan (*enfoce*) peraturan-peraturan.
3. Fungsi pembangunan, yakni keterlibatan lansung pemerintah dalam bentuk bentuk kegiatan ekonomi.
4. Fungsi perwakilan untuk menyatakan pendapat daerah atas hal-hal di luar bidang tanggung jawab eksekutif
5. Fungsi kordinasi dan perencanaan, terutama dalam investasi dan tata guna tanah.

Berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan maka tidak terlepas dari bicara tentang masalah organisasi Pemerintahan sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan Pelaksanaan pemerintahan.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi berasal dari bahasa latin *perticipatio* yang mempunyai arti dalam

bahasa indonesia mengambil bagian atau turut serta (kerjasama). **Sastrodipoetra (di dalam Inu Kencana Syafie 2003:46)** menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Partisipasi merupakan syarat mutlak dari demokrasi. Agar dapat terlaksananya partisipasi yang di harapkan. (**Fadilah, 2009 : 124**) maka terlebih dahulu adabeberapa kondisi yang harus terpenuhi, yakni :

- a. Adanya kesadaran politik yang cukup tinggi bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat.
- b. Tersedianya ruang serta jaminan bagi pelaksanaan pengembangan partisipasi itu sendiri.
- c. Terciptang suatu tradisi partisipasi di setiap proses pembangunan

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan langkah awal indikasi adanya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan secara langsung. Bahkan menurut Tailiziduhu Ndraha (1987 : 33) partisipasi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan desa, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya awal kemauan masyarakat desa untuk berkembang.

Partisipasi masyarakat tentusaja tidak mungkin bergerak begitu saja tanpa adanya hal-hal yang mendorong mereka untuk terlibat dalam pembangunan. **Taliziduhu Nadrha (1987:105)** mengatakan bahwa masyarakat tergerak berpartisipasi apabila jika :

1. Partisipasi itu memberi manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
2. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi ini dapat memenuhi kepentingan masyarakat.
3. Dalam partisipasi ini terjaminnya adanya kontrol dari masyarakat.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, maka pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan dimana masyarakat memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Dukungan materil berupa bantuan biaya ataupun tenaga yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan moril dapat berupa penerimaan, setiap gagasan terutama yang datang dari pemerintah serta memberi tanggapan pikiran (H.A. Ghazali, 1997:5).

Sesuai dengan prinsip pembangunan yang partisipatif, bahwa pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, maka pembangunan tersebut mestilah dilaksanakan berdasarkan imbangnya kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mengacu pada pandangan Moleong (2007) penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena dari 13 Desa yang ada di

Kecamatan Rambah karena penulis melihat bahwa pada Desa Rambah Tengah Hulu mengalami kelambatan pelaksanaan dibidang pembangunan sedangkan Desa ini tidak jauh dari Ibu Kota Kecamatan.

Jenis data, Data primer dan data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Analisis data adalah dengan cara mereduksi data yang telah terkumpul, sehingga bisa ditemukan pokok-pokok tema yang dianggap relevan masalah dan tujuan penelitian.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Rambah Tengah Hulu

Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Kepala desa wajib dalam mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya pemerintah desa dilaarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa melalui dana APBDesa di desa Rambah Tengah Hulu dari Tahun 2009 sampai 2013 melalui dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah desa Rambah

Tengah Hulu hanya melakukan pembangunan di tahun 2009-2010 sedangkan di tahun 2011-2013 tidak ada pembangunan sama sekali. Pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/ Wali kota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Pernyataan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Kegiatan yang lain yang di anggap penting. (Hanif Nurholis 2011:88).

Pelaksanaan pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu melalui dana Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai pelaksanaannya karena biaya operasional aparatur lebih besar dari pada biaya untuk pembanguana pemberdayaan masyarakat, baik untuk lingkungan maupun pemberdayaan untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

2. Faktor – Faktor Penghambat Pembangunan Di Desa Rambah Tengah Hulu Tahun 2009-2013

a. Hambatan Sumber Daya Aparatur Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tidak terlepas dari kepemimpinia kepala desa dan perangkatnya didalam menjakankan roda pemerintahan desa. Didalam pelaksanaan pembangunan desa tingkat pendidikan sangatlah erat kaitannya berhasil tidaknya dalam melaksanakan pembangunan.

Demikian halnya dengan jumlah aparat Desa Rambah Tengah menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel III.2 Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Rambah Tengah Hulu Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013

N O	PEN DIDI KAN	LAKI- LAKI	PEREM PUAN	JUMLAH
1	D3	1	-	1
2	SMA	3	1	4
3	SMP	6	-	6
JUMLAH				11

Sumber :Kantor Kepala Desa Rambah Tengah Hulu 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan pegawai Kantor Kepala Desa Rambah Tengah Hulu, dimana dari 11 orang pegawai hannya 1 orang yang tingkat pendidikannya pendidikan tingkat D3, SMA 4 orang dan 6 orang memiliki tingkat pendidikan SMP. Banyaknya jumlah pegawai yang tamatan SMP dari pada tamatan SMA merupakan salah satu Faktor rendahnya produktifitas kinerja pegawai, hal ini disebabkan masih rendahnya pola pikir serta kesadaran di dalam meningkatkan kinerja pegawainya.

b. Faktor Sumbar Dana

Anggaran merupakan salah satu yang sangat penting didalam proses

pelaksanaan pembangunan, dan juga menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah program ataupun kebijakan pemerintah yang terkhususnya di dalam membutuhkan anggaran demi menyukseskan program pelaksanaan tersebut. Faktor sumber dana ini sangat signifikan di karnakan apabila tidak ada angaran, maka program yang telah dilaksanakan tidak akan berjalan secara optimal, bahkan program yang terkadang sedang berjalan dapat berhenti ditempat karna terhambat anggaran yang dikeluarkan untuk program tersebut.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang mencakup tentang prinsip tentang pengelolaan keuangan yang baik :

- Rancangan APB Des yang berbasis program.
- Rancangan APB Des yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat bawah.
- Keuangan yang dikelola secara bertanggung jawab (akuntabilitas) keterbukaan (tranparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
- Memelihara dan mengembangkan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

C. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan syarat yang mutlak dari demokrasi. Agar dapat terlaksana partisipasi yang diharapkan. Maka ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi (**Fadilah, 2009 : 124**), yakni:

1. Terciptanya suatu tradisi partisipasi dalam setiap proses pembangunan.

2. Adanya kesadaran berpolitik yang tinggi bagi setiap individu maupun kelompok di dalam masyarakat.
3. Tersedianya ruang serta jaminan bagi pelaksana dan pengembangan partisipasi itu sendiri.

Masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu yang baik di dalam pembangunan desa. Seperti yang dikatakan oleh Conyers (Ndraha;1991), bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi terhadap berhasil atau gagalnya sebuah partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan, yakni:

1. Hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan berpartisipasi atau kemauan sendiri atau dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka di dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam rencana akhir.
2. Masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan tidak menarik minat mereka atau tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.

Hal ini untuk menghindari masyarakat dari status sebagai sasaran pembangunan, tetapi menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan atau pelaku pemangunan. Dalam mengukur variabel partisipasi masyarakat maka penulis menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu:

- 1). Sumbangan pemikiran
- 2). Sumbangan tenaga
- 3). Sumbangan material dan dana

Sumbangan pemikiran yang dimaksud disini adalah sumbangan yang diberikan oleh masyarakat melalui pemikiran-pemikiran, gagasan yang berhubungan dengan rencana serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu.

D. Faktor Motivasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Motivasi juga didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri individu berdasarkan mana dari berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Adapun pemotivasian dapat diartikan sebagai pemberian motif-motif sebagai pendorong agar orang bertindak, berusaha untuk mencapai tujuan organisasional (Silalahi, 2002: 341). Motivasi dalam organisasi bertujuan untuk mendorong semangat para anggota organisasi, meningkatkan produktivitas, kedisiplinan, dan menciptakan kesejahteraan organisasi agar tercapai tujuan organisasi dengan baik.

Motivasi sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan akan kehidupan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam iklim organisasi.

Di dalam setiap melakukan pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa hendaknya bisa memahami apa-apa saja yang akan menjadi kebutuhan masyarakat. Dan didalam meleakukan pembangunan desa, pemerintah desa hendaknya harus mampu dan bisa melibatkan masyarakat secara aktif, agar pembangunan tidak menjadi terkotak-kotak atau tumpang tindih dan perlunya pengoptimalisasi anggaran agar setiap anggaran yang di anggarkan tepat sasaran.

Berdasarkan kutipan wawancara dan observasi tersebut tampak sekali masyarakat kurang ingin bermotivasi didalam pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu, dikarenakan mereka belum merasakan dampak pembangunan seperti yang diinginkan masyarakat banyak. Hal ini terlihat dari lebih memilihnya masyarakat pergi bertani karna berdampak langsung disegi pendapatan masyarakat.

E. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Program pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu ini pada prinsipnya direncanakan melalui musyawarah yang baik oleh Pemerintah Desa Rambah Tengah Hulu. Akan tetapi hasil musyawarah pembangunan yang dilakukan tidak berjalan dengan seharusnya, dimana rekomendasi yang diajukan mulai dari Musrembang tingkat desa sulit diperjuangkan baik pada Musrembang tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

2. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan oleh faktor sumber daya aparatur desa yang rendah, belum optimalnya pengelolaan sumber dana desa, belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dan faktor motivasi masyarakat dalam pembangunan yang rendah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah harus bisa mencari jalan keluar untuk bisa melaksanakan pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu ini, salah satunya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam dan objek wisata yang telah ada.
2. Kepala Desa Rambah Tengah Hulu harus bisa menjadi fasilitator untuk membawa masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi didalam pelaksanaan pembangunan, baik dari segi anggaran maupun pikiran untuk menyuksuskan pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu.

F. Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Alex S. Nitisemito, 1982, Partisipasi masyarakat, Gunung Agung, Jakarta.
- Ach, Wasir Ws, et al, ed (1999). Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Deddy T, Tiksondkk. 2005. Evaluasi Pembangunan Pasca Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan, Kerjasama Bappeda Propinsi Sulsel dengan Lembaga Penelitian Unhas. Yogyakarta.
- Fadilah, Putra. 2009. Politik, Partisipasi dan Demokrasi Dalam Pembangunan Program Sekolah Demokrasi. Malang.
- Inu Kencana Syafei, 1998. Ilmu Pemerintahan, Mandar Maju, Bandung
- _____, 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Iwan Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004. Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Pustaka LP3ES: Jakarta.
- Marbun, B.N. 1983. Proses Pembangunan Desa: Erlangga.
- Moleong, J Lexy, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhammad, Yaya dan Priangani, Ade. 2002. Titik Buku Demokrasidan Otonomi. Bandung: Pustaka Raja
- Mustapadijaya AR. 1998. Kebijakan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan Teori dan Harapan, Penerbit Liberty
- Ndraha, Taliziduhu. 1987, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Bina Aksara, Jakarta
- Taliziduhu Ndraha. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Rasyid, Ryass. 2002. Cakrawala Otonomi Daerah, Sinar Grafika
- Rian Nugroho, 2009. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dn Evaluasi, Elekmedia Koputindo: Jakarta.
- Riant Nugroho, 2003. Manajemen Pembangunan Indonesia, Sebuah Pengantar dan Panduan, Jakarta, Elex Media Koputindo
- Siagian, P. Sondang. 2001. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekarto, Soerjono. 2000. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soewarno Handayani. 1981.
Administrasi Pemerintahan Dalam
Pembangunan Nasional, Haji Mas
Agung

Sudriamunawar, Haryono. 2002.
Pengantar Administrasi
Pembangunan. Bandung: Bandar
Maju

Suryaningrat, Bayu. 1982. Pemerintahan
Administrasi Desa dan Kelurahan,
Jakarta : Aksara Baru

Taliziduhu Ndraha. 1991. Dimensi
Dimensi Pemerintahan Desa. Bina
Aksara, Jakarta.

Taliziduhu Ndraha. 2003. Peranan
Administrasi Desa Dalam
Pembangunan, Yayasan Dharma
IIP, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang –Undang Nomor 32 tahun 2004
Tentang Pemerintahan Dearah

Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun
2005 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Nomor 12 Tahun 2007 Tentang
Perencanaan Pembangunan Desa.